

PROBLEMATIKA FAKTOR STUNTING PADA WILAYAH PESISIR (Studi Kebijakan Pada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022)

Azhari¹, La Ode Dediharsiadi², Muis³

^{1,2,3} Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondet author: ld.dediharsiadi@gmail.com

Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to determine Problematic Stunting Factors In Coastal Areas through a Policy Study in Central Buton Regency in 2022. This research is qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out using interview methods, various document studies and observations. The results of this research show that the lack of coordination between various institutions in the regional TPPS Team, such as BKKBN, Village Government, and Community Health Centers, caused high stunting rates in Central Buton Regency, Southeast Sulawesi in in 2022. Apart from that, the existence of societal myths, inadequate parenting patterns, early marriage and poor sanitation also play a role in increasing stunting rates in the area. Financial constraints also caused many work programs within the TPPS Team to not be realized..

Keywords: Coastal Are; Children's Health; Policy Studies; Stunting

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Problematika Faktor Stunting Pada Wilayah Pesisir melalui Studi Kebijakan Pada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, berbagai studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga dalam Tim TPPS daerah, seperti BKKBN, Pemerintah Desa, dan Puskesmas, menyebabkan tingginya angka stunting di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022. Selain itu, masih adanya mitos masyarakat, pola asuh yang tidak memadai, pernikahan dini, dan sanitasi yang buruk turut berperan dalam peningkatan angka stunting di daerah tersebut. Kendala keuangan juga menyebabkan banyak program kerja dalam Tim TPPS tidak dapat terealisasi.

Kata Kunci: Kesehatan Anak; Studi Kebijakan; Stunting; Wilayah Pesisir

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perjalanan sebuah bangsa untuk menjadi negara yang besar merupakan cita-cita semua komponen yang mendiami bangsa tersebut, tanpa terkecuali bangsa Indonesia itu sendiri. Peradaban dan kesejahteraan sebuah negara sangat bergantung pada sumber daya yang dimilikinya baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Keberadaan dua sumber daya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menopang kemajuan sebuah negara. Salahsatu yang menjadi sasaran penguatan sumber daya bangsa ini adalah sumber daya manusianya yaitu bagaimana mempersiapkan manusia-manusia indonesia untuk menuju cita-cita Indonesia Emas pada

tahun 2045. Salah satu kebijakan penguatan sumber daya manusia adalah peran pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia bebas stunting sampai pada tahun 2024 ini.

Keberadaan stunting saat ini, masih menjadi isu krusial dan relevan untuk menjadi bahan kajian ilmiah sebab masih belum puasnya peran pemerintah dalam mengurangi bahaya stunting ini. Meskipun upaya pemerintah ini telah melibatkan banyak stakeholder dan melahirkan berbagai regulasi dan kebijakan publik tetap saja penyebaran stunting belum menemukan titik kepuasan publik oleh pemerintah itu sendiri.

Ancaman stunting akan sangat berdampak bagi Pembangunan kebijakan publik jangka Panjang bagi bangsa Indonesia sebab keberadaan sumber daya manusia tidak akan mampu mengendalikan, menyelesaikan persoalan bangsa maupun kebijakan-kebijakan lainnya jika sumber daya manusia itu sendiri tidak cakap dari jasmani maupun Rohaninya. Oleh karena itu, Stunting ini merupakan problematika yang terjadi akibat minimnya gizi atau malnutrisi bagi balita yang dipicu oleh tidak memadainya asupan gizi terhadap bayi pada rentang waktu yang telah ditentukan. Sehingga menyebabkan Kesehatan bayi yang lahir tidak pada bayi umumnya dan juga menyebabkan tinggi badan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya. Selain melahirkan problema pada fisik bayi tersebut tentunya juga akan berdampak pada Kesehatan rohani maupun perkembangan otak anak tersebut ketika dewasa. Stunting pada anak merupakan sebuah hambatan yang besar yang sangat mempengaruhi bagi perkembangan manusia dan juga telah terjadi terhadap kisaran 162 juta anak dibawah usia 5 tahun diseluruh dunia.

Dalam rilis kementerian Kesehatan berdasarkan hasil survey status gizi Indonesia menyatakan bahwa prevelensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% ditahun 2021 menjadi 21,6% ditahun 2022. Menurunnya akan prevelensi ini merupakan angin segar bagi pemerintah pusat dalam mengejar target angkat stunting menjadi 14% tahun 2024 dapat tercapai.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam mengejar target prevalensi angkat stunting 14% tahun 2024 telah dikeluarkan salahsatu diantaranya adalah peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Keberadaan Perpres ini memberikan penguatan pada 3 komponen diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pada komponen kelembagaan dimana komponen ini diberikan tugas untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada tingkat pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa. pada komponen ini, ditingkat pemerintah pusat, Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) diamanatkan sebagai ketua pelaksana dan wakil presiden Indonesia sebagai pengarah. Selanjutnya untuk pemerintah daerah

maupun pemerintah desa diberikan kebebasan untuk membentuk Lembaga atau Tim TPPS sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah itu sendiri.

- 2) Penguatan pada komponen intervensi yaitu untuk memastikan teraktualisasinya secara sistematis, terarah maupun teratur dan tepat sasaran kepada Masyarakat yang terkena maupun berpotensi terkena stunting melalui pendekatan kekeluargaan.
- 3) Penguatan pada komponen keuangan, ini merupakan komponen yang paling menopang keberhasilan dan terlaksananya dengan baik Upaya penurunan stunting melalui penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan APBD desa serta sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran pemerintah dalam berupaya menurunkan stunting diindonesia terlihat jelas melalui Perpres diatas sehingga tidak ada alasan bagi semua stakeholder terutama pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam berupaya maksimal berperan bersama dalam membantu pemerintah pusat untuk mengejar target 14% target nasional pada tahun 2024 ini.

Akan tetapi, peran pemerintah pusat tersebut seolah tidak seirama dengan peran pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah dimana pada tahun 2022 sebagaimana rilis media <https://databoks.katadata.co.id/> bahwa hasil survey status gizi Indonesia kemenkes prevalensi balita stunting di sultra mencapai 22,7% pada tahun 2022 menempati urutan ke 9 tertinggi nasional. Meski tertinggi akan tetapi berhasil menurunkan stunting sebesar 7,5 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 30,2 %. Terdapat 11 kabupaten yang memiliki angka prevalensi stunting di atas rata-rata provinsi. Kabupaten buton tengah merupakan wilayah dengan angka prevalensi balita stunting tertinggi disulawesi Tenggara dengan mencapai 41,6% hanya turun 1,1 poin dari tahun 2021 sebesar 42,7%.

Saat ini, isu terkait permasalahan kelaparan dan kurangnya gizi banyak didominasi oleh kasus stunting yang dialami oleh bayi dan balita. Kasus stunting seringkali dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya adalah asupan makanan pada ibu hamil yang berpengaruh pada gizi ibu dan janin yang dikandung serta pemberian asi eksklusif selama 6 bulan serta makanan pendamping ASI selama 2 tahun setelah bayi dilahirkan. Asupan makanan ini sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak, ketika asupan makanannya terpenuhi dengan baik maka akan menekan angka stunting pada bayi dan balita. Stunting ini merupakan isu yang telah lama ada di Indonesia.

Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk berdasarkan fakta mengenai kasus stunting di Indonesia melebihi batas toleransi yang ditetapkan WHO yaitu maksimal seperlima dari jumlah keseluruhan balita (Muhammad Elwan et al., 2022).

Keberadaan kabupaten Buton Tengah merupakan wilayah geografis yang berada pada mayoritas pesisir Pantai, sebagai wilayah yang mayoritas mendiami pesisir pantai tentunya umumnya masyarakat tersebut sangat erat berkaitan dengan kehidupan dunia laut yang tentunya kaya dengan sumber daya alam didalamnya. Kekayaan alam tersebut tentunya digunakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat untuk menjadi sumber kehidupannya baiknya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-harinya untuk dikonsumsi berupa (protein, gizi dan sumber Kesehatan lainnya) maupun juga digunakan sebagai sumber pendapatan keuangannya diantaranya bisnis ikan teri maupun rumput laut.

Akan tetapi yang menjadi prolematika pada pemerintah daerah kabupaten buton Tengah pada tahun 2022, menjadi kabupaten yang tertinggi angka prevalensi stunting diprovinsi sulawesi Tenggara padahal berdasarkan letak geografis wilayahnya tersebut berbatasan dengan pesisir pantai dan mayoritas dikelilingi lautan yang tentunya pemenuhan sumber-sumber gizi dan protein dari laut sangat tinggi untuk menunjang Kesehatan gizi masyarakatnya. Melihat fenomena itu peneliti tertarik untuk mengkaji problematika faktor stunting pada wilayah pesisir (studi kebijakan dikabupaten buton Tengah tahun 2022).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, berbagai studi dokumen dan Tindakan observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan tersebut adalah mengambil data dengan tujuan penelitian sehingga data yang akan dituju benar-benar sesuai dengan pengalaman subjek penelitian. Pada penelitian ini memiliki jenis sumber data diantaranya data primer yang merupakan wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berupa jurnal, buku, media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah di Indonesia dalam menangani stunting tentunya akan berbeda dengan model penanganan problem stunting dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya stunting setiap negara tergantung kondisi wilayah, kultur dan sosial masing-masing. Di Indonesia berbagai Tindakan dan langkah yang telah dilakukan oleh semua pihak dengan melibatkan semua stakeholder baik itu pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan juga pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri telah dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target prevalensi stunting 14% ditahun 2024 ini.

Dalam RPJM tahun 2020-2024 pemerintah Indonesia, salahsatu program yang menjadi target prioritas utamanya adalah bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penguatan sumber daya manusia melalui berbagai pemenuhan gizi dan protein terhadap bayi, anak yang baru lahir dan ibu hamil dan orang-orang yang berpotensi terkena stunting sebagai upaya untuk mencegah lajunya perjalanan stunting dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut Langkah konkrit pemerintah tersebut dituangkan melalui peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan berbagai tugas yang telah dirumuskan untuk ditindaklanjuti bersama. Seiring dengan langkah konkrit pemerintah pusat tersebut melalui peraturan kebijakan diatas yang tentunya juga melibatkan pemerintah daerah untuk berperan mengaktualisasikan tujuan tersebut. Melalui perpres tersebut di uraikan bahwa percepatan penurunan stunting di Indonesia dikerjakan secara holistik, berkualitas dan integratif melalui kordinasi, sinergitas dan menyingkronkan dengan berbagai komponen pemangku kepentingan.

Pasca lahirnya perpres ini, peraturan tersebut memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penyelesaian penurunan stunting di daerah masing-masing demi mencapai target nasional angka prevalensi stunting 14% ditahun 2024 ini. Upaya pemerintah dalam pencegahan stunting melalui pilar strategi nasional, komitmen dan kepemimpinan, kampanye dan komunikasi tentang perubahan perilaku, konvergensi program pusat hingga daerah, penguatan ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi.

Perintah peraturan tersebut juga diamanahkan untuk dikerjakan oleh pemerintah daerah dikabupaten Buton Tengah, akan tetapi keberadaan angka stunting pada tahun 2022 justru menjadi tertinggi diprovinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, penurunan angka stunting dari tahun sebelumnya justru hanya 1,1 poin. Padahal jika merujuk pada kondisi wilayah dan geografis kabupaten buton Tengah berada disepanjang pesisir Pantai yang seharusnya

pemenuhan standar gizi dan proteinnya terjamin sebab wilayah tersebut tidak terpisahkan dengan lautan yang kaya akan sumber daya protein dan gizinya.

Faktor Tingginya angka stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022, meski berada pada wilayah pesisir Pantai yang notebenanya kaya akan sumber daya protein dan gizi di sebabkan di antaranya sebagai berikut:

1. Komponen kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

a. Badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN)

Salahsatu Tingginya faktor stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 disebabkan oleh tidak terkoordinasinya dengan baik komponen kelembagaan di daerah tersebut. Sebagaimana amanat Perpres nomor 72 tahun 2021, BKKBN yang diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan teknis penyelesaian penurunan stunting justru tidak memadai. Hal ini disebabkan tidak ditemukan model dan SOP (standar operasional procedural) yang baku bagi pemerintah daerah melalui BKKBN sebagai koordinator tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dalam menyelesaikan stunting di daerah tersebut sampai pada tingkatan desa. Minimnya sumber daya manusia yang dikerahkan untuk penanganan stunting di daerah tersebut juga menjadi penyebab tingginya stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022.

Selain itu, tidak adanya langkahnya kongkrit bagi tim Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dikoordinatori oleh BKKBN terhadap tindak lanjut hasil rapat yang telah dirumuskan bersama stakeholder. Juga tidak adanya pembagian tugas yang lebih spesifik dan terarah oleh komponen yang terlibat dalam tim TPPS tersebut sehingga menyebabkan langkah kongkrit penurunan stunting dikabupaten Buton Tengah tahun pada tahun 2022 tidak masimal.

b. Pemerintahan Desa

Pada tataran pemerintahan desa tidak adanya pengetahuan yang komprehensif dalam upaya memahami penanganan penurunan stunting baik pengetahuan tentang mendeteksi, mencegah, penyebab dan penanganan korban stunting. Pemerintah desa hanya dibekali pengetahuan dasar tentang model pencegahan stunting secara umum dan kasat mata melalui intruksi memerintahkan warga makan dan minum yang sehat melalui pemenuhan protein dan gizi yang baik bagi warga yang memiliki anak, balita dan ibu hamil.

Selain hal tersebut, tidak adanya anggaran tersoroti secara memadai yang dialokasikan oleh pemerintah desa melalui APBdes untuk membiayai pelaksanaan penurunan stunting pada wilayah masing-masing desa tersebut sehingga

menyebabkan pemerintah desa sulit melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mewujudkan upaya penurunan stunting didesanya.

Dalam wawancara terhadap tenaga medis desa menyebutkan bahwa problematika yang menyebabkan tingginya angka stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 disebabkan tidak memadainya anggaran penanganan stunting ditingkat desa, hal ini bisa dilihat masih terdapat desa yang bahkan untuk alat-alat tenaga medis posyandu seperti alat tensi medis sekalipun tidak ada didesa tersebut.

Problem lainnya yang dijumpai dalam penelitian ini adalah meskipun ada Tim TPPS yang dikoordinatori oleh BKKN terus bekerja akan tetapi tidak secara maksimal, sebab tidak adanya langkah kongkrit dari tindak lanjut dari hasil rapat bersama dengan pemerintah desa. dalam penanganan ini keberadaan pemerintah desa hanya bersifat pasif menunggu arahan dan instruksi dari BKKBN sebagai penanggung jawab tim. Bersifat pasifnya pemerintah desa tersebut menyebabkan turut andilnya peningkatan stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022 begitu tinggi.

c. Persepsi Tenaga Medis

Faktor tingginya stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022 juga disebabkan oleh tidak maksimalnya peran puskesmas sebagai sentra pelayanan Kesehatan ditingkat kecamatan. Hal ini disebabkan karena peran puskesmas bersifat pasif yaitu menunggu perintah dan arahan dari koordinator TPPS untuk mengambil Langkah dan Tindakan untuk melakukan pendataan warga yang terkena stunting.

Selain pasifnya peran puskesmas sebagai sentra kesehatan masyarakat pada tim percepatan penurunan stunting ini, juga terjadi mis-persepsi atau perbedaan pandangan terhadap standar penyakit stunting dalam pandangan tenaga kesehatan yang terdapat dipuskesmas. Hal tersebut dijumpai melalui wawancara terhadap tenaga medis yang terdapat di salahsatu puskesmas mawasangka tengah kabupaten buton Tengah bahwa standar warga yang terkena stunting terjadi perbedaan pendapat antara para tenaga medis sebagaimana standar yang dipelajari berdasarkan bidang keilmuan masing-masing di institusi pendidikannya.

Perbedaan standar persepsi terhadap penyakit stunting menurut keilmuan tenaga medis gizi dan tenaga medis kebidanan dalam menentukan seseorang terkena stunting atau tidak, turut serta menyumbang tingginya angka stunting dikabupaten buton Tengah. Perbedaan pandangan ini pula menyebabkan tenaga Kesehatan tersebut dalam bekerja untuk mendata warga yang terkena stunting tidak maksimal. Sebagaimana hasil wawancara terhadap tenaga medis yang tergabung dalm tim TPPS mengatakan bahwa *"kami dalam bekerja menentukan warga masyarakat terkena stunting atau tidak menjadi problematic,*

sebab bagi kami di ahli gizi mengidentifikasi ciri-ciri warga terkena stunting seperti kurus, pendek dan lain-lain. Akan tetapi belum tentu ciri-ciri tersebut dianggap sebagai penyakit stunting dalam persepsi ilmu kebidanan."

Perbedaan standar keilmuan inilah juga yang menjadi salahsatu tidak maksimalnya penanganan stunting dimasyarakat. Disisi lain Tidak adanya pedoman teknis dalam menentukan standar stunting bersama di lingkup puskesmas terutama para tenaga medisnya sehingga menyebabkan penanganan stunting dikabupaten buton Tengah tidak bekerja maksimal.

Tidak terkoordinasinya komponen kelembagaan ini, baik pada tingkat desa, tingkat puskesmas dan tingkat BKKBN sebagai koordinator TPPS menyebabkan para komponen lembaga tersebut saling lempar tanggung jawab dalam penanganan stunting sehingga menyebabkan lonjakan angka stunting nomor satu diprovinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022.

2. Kultur Masyarakat

Potensi kekayaan sumberdaya alam laut diindonesia termaksud yang paling produkti didunia dan juga masuk dalam 10 besar penghasil sumber daya kelautan didunia. Apalagi wilayah Sulawesi Tenggara penghasil kekayaan laut yang melimpah ruah dari waktu ke waktu. Kekayaan yang paling memadai adalah ikan. Sebab ikan merupakan sumber makanan yang memiliki protein yang tinggi yang sangat cocok untuk kesehatan manusia.

Sebagai wilayah yang mendiami pesisir Pantai kabupaten Buton Tengah mestinya memiliki suplai protein dan gizi yang tinggi, sebab wilayah lautan memiliki sumber daya alam yang tak terhingga. Akan tetapi justru terdapat banyak masyarakat kabupaten Buton Tengah yang terjangkiti penyakit stunting pada tahun 2022.

Factor terjadinya stunting juga disumbangkan oleh keadaan sosial dan ekonomi keluarga dalam masyarakat tersebut diantaranya Pendidikan seorang ibu, tingkatan pekerjaan, jumlah pendapatan dan wawasan ibu mengenai protein, gizi serta jumlah anggota keluarga. Factor Penyebab di antaranya sebagai berikut:

a. Mitos Masyarakat

Masyarakat merupakan Kumpulan interaksi sesamanya dalam lingkungannya itu sendiri. Salah satu tingginya angka stunting dikabupaten buton Tengah pada tahun 2022 karena masih terpeliharanya mitos dalam masyarakat kabupaten Buton Tengah bahwa jika seorang anak kecil atau balita jika diberikan konsumsi ikan akan menyebabkan bau badan terhadap anak tersebut jika sudah dewasa. Sehingga banyak orang tua dalam mengasuh anaknya atau anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan terbaiknya tidak diberikan asupan

protein yang bersumber dari lautan terutama ikan. Sehingga memicu terjadinya stunting dikabupaten buton Tengah tahun 2022 begitu tinggi.

Selain itu kurangnya peran pemerintah daerah melalui pemerintah desa dalam membuat kebijakan berupa sosialisasi tentang pentingnya pemberian gizi dan protein dari ikan bagi pertumbuhan anak-anak serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi tentang ketidakrelevannya mitos yang berkembang dimasyarakat yang mengatakan bahwa anak kecil ketika diberikan konsumsi makanan berupa ikan akan menyebabkan bau badan ketika dewasa.

b. Pola asuh

Selain kuatnya sebgaiian masyarakat mempercayai keberadaan mitos terhadap implikasi anak kecil atau balita yang mengkonsumsi ikan. Meningkatnya stunting dikabupaten Buton Tengah juga disebabkan oleh polah asuh terhadap orang tua terhadap anak, dimana dalam satu rumah tangga terdapat dua atau tiga kepala keluarga sehingga tidak memadainya gizi bagi anak-anak yang mendiami rumah tangga tersebut. Selain itu banyak anak-anak yang dititipkan oleh orang tuannya kepada nenek atau kakek mereka dikarenakan orang tua anak tersebut banyak melakukan perantauan didaerah lain. Hal ini sebagaimana dijumpai dalam wawancara terhadap kepala puskesmas desa wakabungura bahwa kami dari pihak puskesmas sudah berupaya memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak didalam rumah tangga yang terdapat balita atau anak kecilnya, akan tetapi ketika makanan tersebut dibagikan kepada anak tersebut makanan itu bukan hanya dimakan oleh anak kecil yang seharusnya membutuhkan tetapi juga orang dewasa atau anak-anak lainnya yang sehat yang terdapat didalam rumah tangga tersebut ikut serta memakannya. Selain itu, banyaknya anak-anak yang masil kecil telah ditinggalkan oleh orang tuanya untuk merantau didaerah lain dengan alasan untuk memperbaiki Nasib. Keberadaan pola asuh ini dengan menitipkan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan yang seharusnya adalah bagian dari sumbangsi tingginya angka stunting dikabupaten Buton Tengah tahun 2022.

c. Pernikahan dini dan sanitasi

FaKtor lainnya yang penyumbang tingginya stunting dikabupaten Buton Tengah tahun 2022 adalah persoalan pernikahan dini dan sanitasi. Berbagai riset memperlihatkan pengaruh antara lingkungan, sanitasi dan kebersihan berkaitan erat dengan eksistensi stunting. Kecamatan Mawasangka Tengah merupakan kecamatan penyumbang tertinggi angka stunting dikabupaten Buton Tengah. Dalam wawancara terhadap kepala desa latongau, kecamatan Mawasangka Tengah mengatakan bahwa *"tingginya stunting dikecamatan Mawasangka Tengah disebabkan pernikahan dini terhadap warganya, pemerintah desa*

telah berupaya melakukan pencegahan perkawinan tersebut akan tetapi selalu dilakukan dengan cara diam-diam".

Selain pernikahan yang dini yang terjadi dalam masyarakat tersebut, penyebab lain tingginya stunting dikecamatan tersebut adalah tidak memadainya sanitasi bagi warganya, sebab kondisi wilayah yang didiami oleh mayoritas masyarakat kabupaten Buton Tengah adalah bebatuan sehingga menyulitkan bagi masyarakatnya untuk membuat sanitasi.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai kepala daerah dalam menangani kebutuhan dasar terutama sanitasi terhadap masyarakatnya yang telah menjadi problema sosial yang berkepanjangan juga menyebabkan angka stunting meningkat dikabupaten buton Tengah.

3. Komponen Keuangan

Dalam skala keuangan nasional presiden Jokowi menekankan urgennya Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebab kunci dari segala startegi yang akan dicapai ialah bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor penggerak utama teraktualisasinya pelaksanaan program kebijakan penanggulangan penurunan stunting adalah tersedianya anggarannya yang memadai yang disediakan oleh pemerintah dalam merealisasikan kebijakannya. Oleh karena itu pemerintah pusat melalui berbagai lintas kementerian menganggarkan pendanaan khusus penanganan stunting melalui berbagai regulasi sebagai jembatan pelaksanaan tugas tersebut.

Akan tetapi dalam implementasi yang terjadi di daerah tidak berjalan sebagaimana harapan pemerintah pusat. Sebab keberadaan TPPS daerah yang dikoordinatori oleh BKKBN tidak menyediakan anggaran yang maksimal baik dari operasional, honor dan bantuan-bantuan pembelian fisik berupa bahan makanan ataupun barang lainnya untuk digunakan kepada masyarakat yang berpotensi terkena stunting. Hal ini dijumpai dalam wawancara terhadap pihak BKKBN bahwa *tidak maksimalnya pelaksanaan pencegahan stunting oleh TPPS kabupaten Buton Tengah tahun 2022 karena kurangnya anggaran yang memadai dalam mengeksekusi segala program yang dicanakan oleh pemerintah pusat.*

Lebih lanjut, dalam wawancara terhadap pemerintah desa juga mengatakan demikian bahwa *tidak adanya anggaran yang memadai yang disediakan oleh BKKBN sebagai koordinator pusat untuk melaksanakan pencegahan stunting di desa. meskipun terdapat beberapa anggaran dana desa akan tetapi sangat tidak mencukupi dalam mencegah stunting.* Selain itu juga Kurang perhatiannya pemerintah desa dalam memberikan intervensi pada prioritas kebijakan keuangan dalam peningkatan kesehatan masyarakat desa melalui

penganggaran pembelian alat-alat medis seperti alat tensi Kesehatan dan alat-alat medis lainnya.

Disamping itu, di pihak kecemasan juga menyampaikan bahwa BKKBN sebagai koordinator TPPS tidak menyediakan anggaran yang memadai dalam mengeksekusi pelaksanaan program yang dicanakan bersama. Hal ini terlihat kegiatan TPPS hanya sebatas rapat bersama lintas sektoral tanpa ada tindak lanjut setelahnya. Disamping itu, Kurangnya peran pemerintah daerah terutama bupati sebagai kepala daerah dalam membuat kebijakan prioritas anggaran penanganan stunting ini, sehingga menyebabkan kabupaten buton tengah menjadi kabupaten tertinggi stunting tertinggi disulawesi Tenggara pada tahun 2022.

KESIMPULAN

Tidak terkoordinasinya secara konferehensif Pada tataran kelembagaan yang terdapat dalam Tim TPPS daerah yang terdiri dari pihak BKKBN, Pemerintah Desa dan pihak Puskesmas menyebabkan stunting kabupaten buton Tengah menjadi tertinggi disulawesi Tenggara pada tahun 2022. Selain itu pada tataran komponen kultur Masyarakat masih terdapat mitos masyarakat yang dipertahankan, pola asuh yang tidak memadai dan pernikahan dini serta sanitasi yang kurang baik merupakan penyebab andilnya angkat stunting diButon Tengah meningkat serta tidak memadainya komponen keuangan pada Tim TPPS tingkat daerah yang terdiri dari berbagai stakeholder sehingga banyak program kerja yang tidak teraktualisasi. Tidak terlaksananya program kerja dikarenakan Minimnya anggaran yang terdapat pada Tim TPPS juga sebagai salahsatu penyebab tingginya stunting dikabupaten Buton Tengah pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedihariadi, La Ode, 'Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia', *RECHTENS*, 12.1 (2023), 49–66
<<https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1965>>
- Erowati, salasti dinas mudi; turtiantoro; dewi, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021', *Journal of Politic and Government Studies*, 11 (2022), 105–17
<<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35928>>
- Kementerian Sekretariat Negara, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting', 2021, 1–18
- Kukerta Lembah Sari, 'Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting', *Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting*, 2.2 (2022), 25–33
<<https://ijosc.ejournal.unri.ac.id/index.php/ijosc/article/view/41/>>
- Latifa Suhada Nisa, 'Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia', *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 13.2 (2018), 173–79
<<http://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/78>>

- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>
- Nirmala, Intan Ria, and Lestari Octavia, 'Peran Makanan Laut Sumber Protein Dan Anak Stunting Di Wilayah Pesisir', *Jurnal Stunting Pesisir Dan Aplikasinya*, 1.2 (2022), 1–7 <<https://doi.org/10.36990/jspa.v1i2.707>>
- Nurva, Liza, and Chatila Maharani, 'Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12.02 (2023), 74–83
- Patanda, Mercy, Sugeng H. Wisudo, Daniel R. Monintja, and Budy Wiryawan, 'Sustainability for Reef Fish Resource Based on Productivity and Susceptibility in Wangi-Wangi Island, Southeast Sulawesi, Indonesia', *AAFL Bioflux*, 10.4 (2017), 861–74
- Priyono, Priyono, 'Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting Di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)', *Jurnal Good Governance*, 16.2 (2020), 149–74 <<https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>>
- rahman, zainal; werenfridus, mariano;rynoza, dwioka;Ukhra, aunil;wisnu, Nugraha., 'ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DAN RELEVANSI PENERAPAN DI MASYARAKAT (Studi Kasus: Desa Donowarih)', *KARTA RAHARDJA*, 2.1 (2021), 27–33 <<http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr> ANALISIS>
- Rahman, Hardiyanto, Mutia Rahmah, and Nur Saribulan, 'UPAYA PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA Analisis Bibliometrik Dan Analisis Konten', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII.01 (2023), 44–59